

ABSTRAK

PERAN PEMERINTAH DALAM MENDORONG GERAKAN *COLLECTIVE ACTION* PENANGGULANGAN RADIKALISME (STUDI BADAN KESBANGPOL PROVINSI LAMPUNG)

Oleh

ANASTASYA NASWA AZZAHRA

Masih banyaknya masyarakat di Provinsi Lampung yang berlawanan dengan ideologi Pancasila oleh karena itu penelitian ini dibuat bertujuan untuk melihat peranan pemerintah yang berfokus pada Badan Kesbangpol Provinsi Lampung dalam mendorong gerakan *collective action* sebagai upaya pencegahan penyebaran paham radikalisme di Provinsi Lampung. Provinsi Lampung merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang menduduki presentasi tertinggi dalam penyebaran bibit paham radikalisme, hal ini didukung dengan adanya kasus penangkapan terduga jaringan paham radikalisme yang terjadi di Provinsi Lampung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, observasi, wawancara, dan dokumentasi yang menggunakan empat indikator yang menjadi penentu optimal dan tidak optimalnya peran pemerintah dalam mendorong gerakan *collective action*, yaitu: (1) peran regulator, (2) peran fasilitator, (3) peran katalisator. Hasil penelitian ini menunjukkan Badan Kesbangpol Provinsi Lampung dalam mendorong gerakan *collective action* penanggulangan radikalisme telah dilakukan secara optimal, walaupun masih terdapat beberapa kekurangan yang terjadi akibat adanya faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan dalam mencegah penyebaran paham radikalisme. Oleh karena itu dalam meningkatkan peranan Badan Kesbangpol dalam mencegah penyebaran paham radikalisme perhatian lebih lanjut dari pemerintah terkait tenaga ahli IT guna mendukung performa dalam mencegah penyebaran paham radikalisme di era globalisasi serta diperlukannya pembaruan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol guna mencegah penyebaran paham radikalisme di dunia maya.

Kata Kunci: Peran, Pemerintah, *Collective action*, Radikalisme.

ABSTRACT

THE ROLE OF GOVERNMENT IN ENCOURAGING THE COLLECTIVE ACTION MOVEMENT TO OVERCOME RADICALISM (LAMPUNG PROVINCE KESBANBPOL AGENCY STUDY)

By

ANASTASYA NASWA AZZAHRA

There are still many people in Lampung Province who are opposed to the Pancasila ideology, therefore this research was aimed at looking at the role of the government which focuses on the Lampung Province Kesbangpol Agency in encouraging collective action movements as an effort to prevent the spread of radicalism in Lampung Province. Lampung Province is one of the provinces in Indonesia which has the highest percentage in spreading the seeds of radicalism, this is supported by the arrest of a suspected radicalism network that occurred in Lampung Province. The methods used in this research are observation, interviews and documentation using four indicators that determine the optimal and non-optimal role of government in encouraging collective action movements, namely: (1) the role of the regulator, (2) the role of the facilitator, (3) catalytic role. The results of this research show that the Lampung Province Kesbangpol Agency in encouraging the collective action movement to overcome radicalism has been carried out optimally, although there are still several shortcomings that occur due to inhibiting factors in implementing activities to prevent the spread of radicalism. Therefore, in increasing the role of the Kesbangpol Agency in preventing the spread of radicalism, further attention from the government regarding IT experts to support performance in preventing the spread of radicalism in the era of globalization and the need to renew activities carried out by the Kesbangpol Agency to prevent the spread of radicalism in cyberspace.

Keywords: Role, Government, Collective action, Radicalism.